



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN



2022

REVIU PELAKSANAAN ANGGARAN

SEMESTER I

KPPN SOLOK
KANWIL DJPb PROV. SUMBAR
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN



Foto : Dermaga Singkarak
Oleh : Bayu Hendro A

TIM PENYUSUN



*Danau Singkarak
Oleh : Denny Aulia*

Penanggung Jawab

Budi Utomo

Ketua

Khairul Syawal

Anggota

Bayu Hendro Asmoro

Widia Nova Syamita

Sania Zelvira

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) Semester I Tahun 2022 tingkat KPPN telah berhasil disusun dengan baik dan tepat pada waktunya. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RPA ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penyusunan RPA ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait kinerja pelaksanaan anggaran periode Semester I Tahun 2022 di wilayah kerja KPPN Solok yaitu Kota Solok, Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan. Reviu ditekankan pada permasalahan dalam pencairan anggaran pada satuan kerja Kementerian/Lembaga dan penyaluran belanja transfer ke daerah berupa DAK Fisik dan Dana Desa beserta isu-isu penting pelaksanaan anggaran Semester I Tahun 2022. Dari hasil reviu tersebut dapat diketahui apakah belanja pemerintah telah dilaksanakan dengan baik dan berkualitas walaupun masih dalam masa pandemi Covid-19. Selanjutnya, diperlukan juga early warning yang dilakukan KPPN untuk mitigasi risiko pelaksanaan anggaran yang mungkin terjadi pada Semester I Tahun 2022 dan strategi yang dapat dilakukan KPPN untuk mencegah terjadinya permasalahan penyaluran dana APBN.

Besar harapan kami bahwa RPA Semester I Tahun 2022 ini dapat menjadi referensi dan masukan bagi para stakeholders dan menjadi alat ukur dalam perencanaan kegiatan dan anggaran di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dan menyempurnakan sistem pelaksanaan anggaran sehingga penyaluran dana APBN di daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerja KPPN Solok.

Kotobaru, 16 Agustus 2022

Kepala KPPN Solok



Budi Utomo

DAFTAR ISI



Sawah Solok
Oleh: Denny Aulia

●	KATA PENGANTAR	i
●	DAFTAR ISI	ii
●	TUGAS DAN FUNGSI KPPN	1
●	APBN KITA	3
●	KINERJA REALISASI BELANJA K/L	4
●	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN	6
●	TANTANGAN EKSEKUSI BELANJA	7
●	WARNING SEMESTER II	9

TUGAS DAN FUNGSI KPPN SOLOK

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.01/2016, KPPN Solok diklasifikasikan sebagai KPPN Tipe A1 yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara

Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPPN Solok menyelenggarakan fungsi:

1. pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan
2. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN)
3. penyaluran pembiayaan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
4. penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara
5. penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara
6. pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi serta pertanggungjawaban bendahara
7. pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
8. pelaksanaan tugas kepatuhan internal
9. pelaksanaan manajemen mutu layanan
10. pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (*Customer Relationship Management*)
11. pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan Pembina Pengelola Perbendaharaan (*Treasury Management Representative*)
12. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara
13. pengelolaan rencana penarikan dana
14. pengelolaan rekening pemerintah
15. pelaksanaan fasilitasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah
16. pelaksanaan layanan bantuan (*helpdesk*) penerimaan negara
17. pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja
18. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kredit Program
19. pelaksanaan Kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dan
20. pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

KPPN Solok melayani 65 satker instansi vertikal Kementerian/Lembaga dan 1 satker desentralisasi yang tersebar pada wilayah Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, dan Kota Solok.

Struktur Organisasi KPPN Solok

Per 30 Juni 2022



Sumber: PbnOpen



Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada mitra kerja, pada tahun 2022 KPPN Solok mengembangkan inisiatif dan inovasi layanan sebagai berikut:

1. Sistem Aplikasi Persuratan dan SKPP Online (SARASO)

SARASO merupakan aplikasi yang menampilkan monitoring surat keluar KPPN Solok yang ditujukan kepada satuan kerja dan SKPP Online yang membantu satuan kerja KPPN Solok dalam pembuatan SKPP secara online dengan harapan dapat meminimalisir terjadinya pengembalian pengesahan SKPP.

Kode Satker	Nama Pegawai	NIP	Nomor SKPP	Aksi
66202	OLGA REDITERA	196304011986031004	UP.03.01/497-13.11/V/2021	[Edit] [Hapus]
66395	EMHERY, BA	196305081992022001	B_545/HK.03/18-B/KU.00.1/06/2021	[Edit] [Hapus]

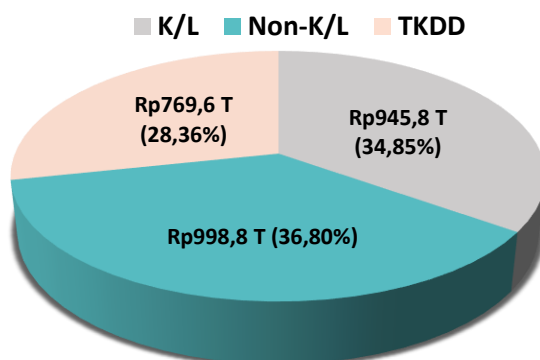
2. Basamo Gencarkan Digipay (BASANDI)

Inovasi ini merupakan bentuk komitmen KPPN Solok bersama Bank BRI KC Solok dalam mempercepat implementasi belanja nontunai melalui Digipay002. BASANDI menyediakan ruang bagi para satuan kerja maupun vendor untuk saling berkoordinasi serta menerima pembinaan dan pelatihan terkait Digipay002. Per 30 Juni 2022 tercatat sebanyak 19 satker dan 7 vendor bergabung dalam digipay002.

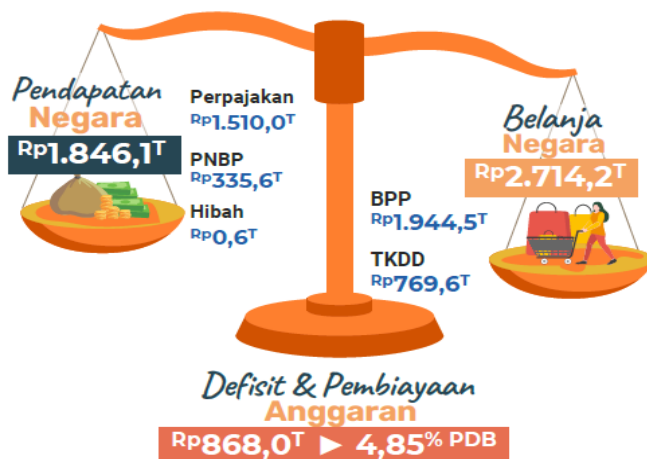
Kebijakan pelaksanaan anggaran pada tahun 2022 berbeda dengan tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya reformulasi IKPA TA 2022 yang berfokus pada kualitas belanja melalui prinsip mendukung belanja berkualitas dengan penguatan *value for money* dalam penilaian kinerja, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja, serta penerapan kewajaran perlakuan (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L sebagaimana diatur dalam PER-5/PB/2022.

APBN KITA

Pagu APBN 2022



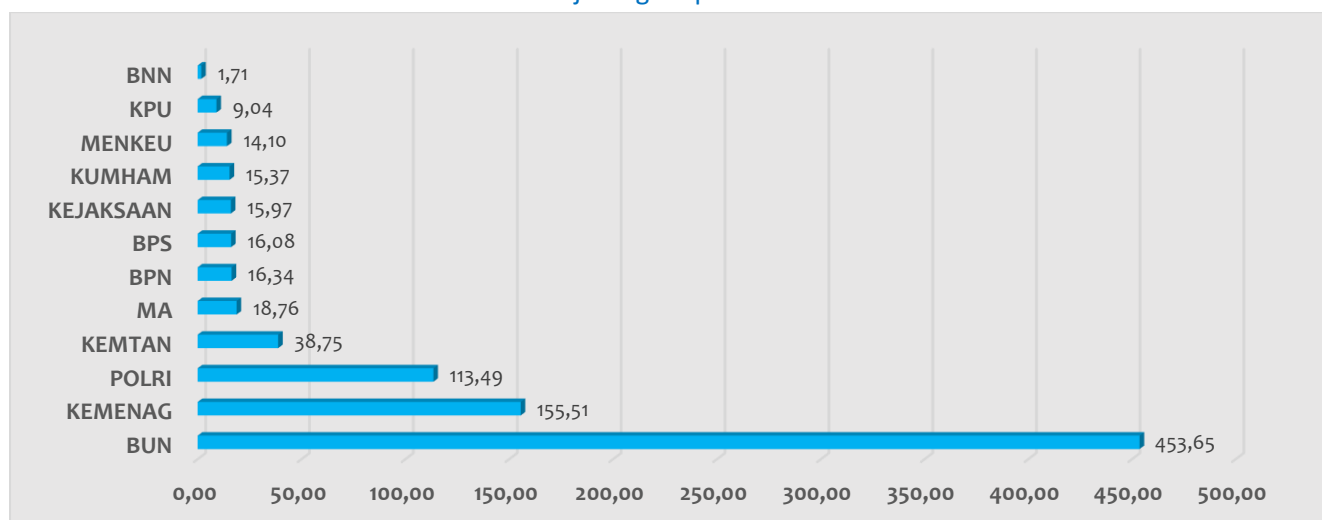
Postur APBN 2022



Sumber : Informasi APBN 2022

Pada TA 2022, belanja negara yang dialokasikan pada wilayah kerja KPPN Solok adalah sebesar Rp868,77 miliar, yang terdiri atas Belanja K/L sebesar Rp415,12 miliar (47,78%) dan TKDD sebesar Rp453,65 miliar (52,22%), dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp miliar):

Grafik 2.1 Belanja Negara pada KPPN Solok



Sumber data: Aplikasi MEBE, diolah

Pada Tahun 2022, terdapat belanja besar yang disalurkan melalui KPPN Solok, yaitu Kegiatan Pengelolaan Transfer dengan pagu sebesar Rp453,65 miliar dan sudah terealisasi sebesar Rp132,17 miliar (29,14%). Selanjutnya disusul Kegiatan Pembangunan Asrama 2 Lantai pada Polres Solok Kota senilai Rp3,32 miliar, Kegiatan Pembangunan Fasilitas Penunjang Rusun 2 Lantai pada Polres Solok senilai Rp731,15 juta, Kegiatan Pengerjaan Pagar Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan senilai Rp543,03 juta.



KINERJA REALISASI BELANJA K/L

Alokasi belanja pemerintah pusat yang dikelola oleh KPPN Solok pada semester I Tahun 2022 tersebar pada 6 dari 11 klasifikasi fungsi sebagaimana digambarkan dalam grafik berikut (dalam Rp miliar):

Grafik 3.1 Belanja berdasarkan Fungsi



Sumber data: Aplikasi MEBE, diolah

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa pagu tertinggi terdapat pada fungsi Pelayanan Umum (56,73%) dan pagu terendah pada fungsi Lingkungan Hidup (1,88%). Per 30 Juni 2022, total realisasi mencapai 36,95% dari pagu anggaran dimana fungsi dengan realisasi terbesar adalah fungsi Pendidikan (48,20%), sedangkan realisasi terendah adalah fungsi Pelayanan Umum (30,20%). Salah satu penyebab rendahnya realisasi pada periode ini akibat belum maksimalnya realisasi DAK Fisik mengingat batas penyampaian dokumen syarat penyaluran DAK Fisik Tahap I jatuh pada tanggal 21 Juli 2022. Disamping itu, terdapat pagu yang diblokir sebesar Rp11,48 miliar (2,77% dari Pagu K/L).

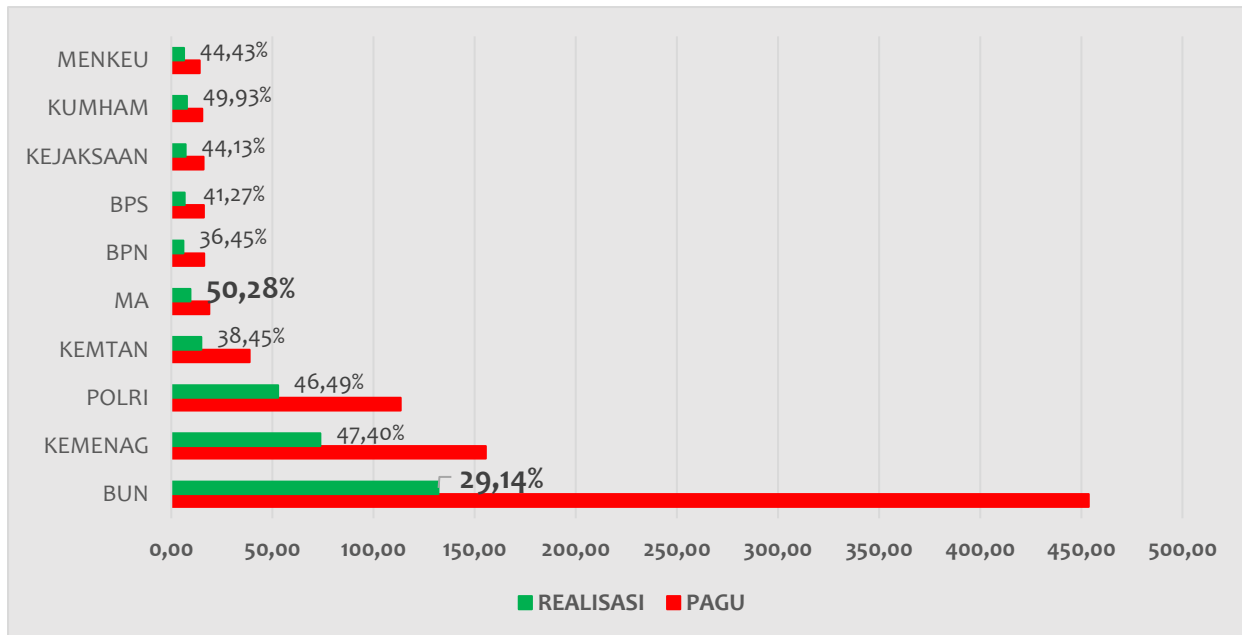
Pagu dan Realisasi Belanja K/L tiap bulan adalah sebagai berikut (dalam Rp juta).

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi						Total Realisasi	Persentase
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni		
1	B Pegawai	281.971,29	14.396,02	17.320,18	21.123,52	38.072,15	20.447,42	22.343,71	133.702,98	47,42%
2	B Barang	125.802,35	1.457,72	8.161,29	11.801,69	11.154,31	8.570,47	11.056,96	52.202,44	41,50%
3	B Modal	7.348,74	0,00	418,41	849,38	368,62	161,31	1.173,69	2.971,41	40,44%
4	B Transfer	453.651,67	0,00	40.475,34	32.986,91	12.026,56	7.151,16	39.531,52	132.171,49	29,14%
TOTAL		868.773,05	15.853,74	66.375,22	66.761,49	61.621,65	36.330,36	74.105,88	321.048,33	36,95%

Sumber data: Aplikasi MEBE, diolah

Pada bulan April terjadi peningkatan yang signifikan pada realisasi belanja pegawai, yaitu mencapai 80,24% dibanding periode sebelumnya karena adanya pembayaran belanja pegawai berupa Tunjangan Hari Raya (THR)

3.2 Pagu dan Realisasi K/L terbesar Lingkup KPPN Solok

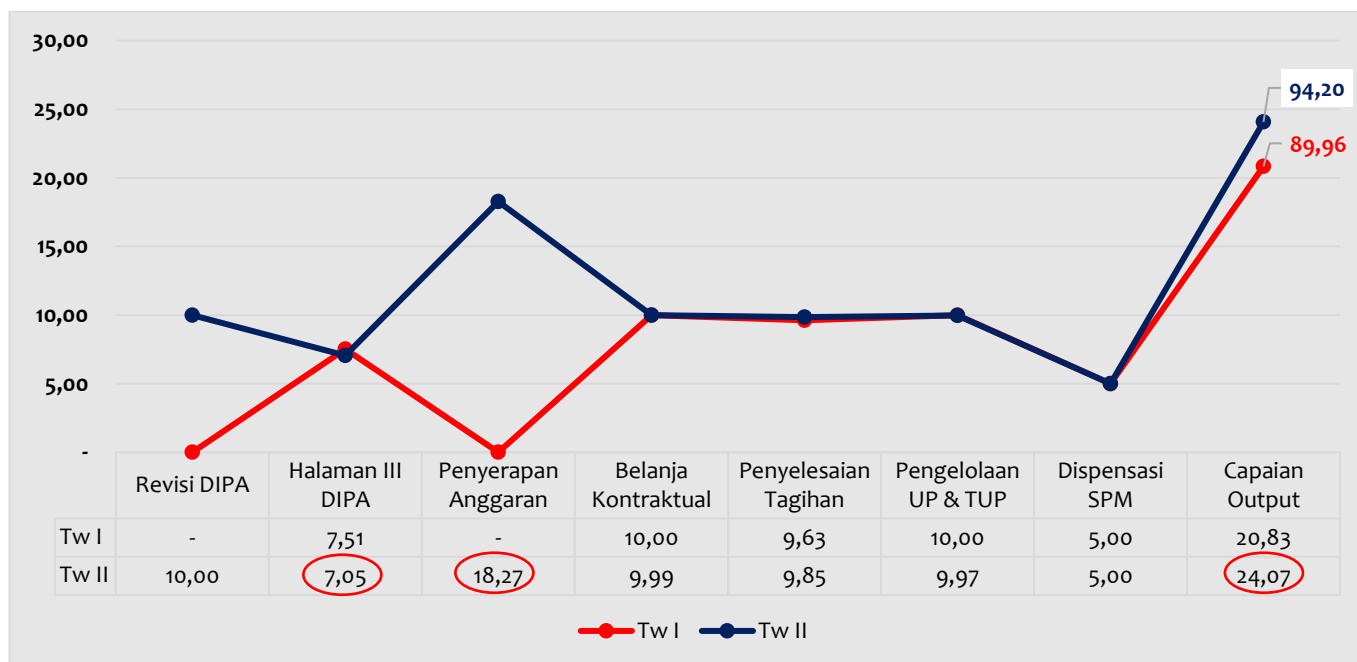


Pagu terbesar terdapat pada satker KPPN sebagai BUN sebesar Rp453,65 miliar, namun realisasinya paling rendah baru mencapai 29,14%. Sementara K/L dengan realisasi terbesar adalah Mahkamah Agung dengan capaian sebesar 50,28% dari pagu.



CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN

Sesuai PER-5/PB/2022, pada tahun 2022 penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mengalami reformulasi, dimana sebelumnya mencakup 13 indikator berubah menjadi 8 indikator.



Berdasarkan grafik di atas, capaian IKPA Triwulan II mencapai 94,20 mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Terdapat 3 indikator dengan capaian paling rendah:

Indikator	Penyebab	Rekomendasi dan Arahan
Halaman III DIPA	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas perencanaan belum optimal Satker tidak menjadikan halaman III DIPA sebagai acuan dalam realisasi belanja Kurangnya pemahaman KPA terkait urgensi revisi halaman III DIPA 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan koordinasi internal antara bagian perencanaan dan pelaksanaan Dalam mengajukan tagihan/SPM ke KPPN satker agar selalu berpedoman pada halaman III DIPA Melakukan revisi halaman III DIPA pada awal triwulan
Penyerapan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> Satker tidak menyusun rencana kegiatan dan rencana realisasi belanja secara matang Blokir pagu Pergantian pejabat perbendaharaan 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan koordinasi internal antara pengelola keuangan dan penanggung jawab kegiatan agar pengajuan tagihan sesuai jadwal kegiatan yang ditetapkan Melakukan koordinasi dengan eselon I terkait pagu yang diblokir Melakukan akselerasi penyerapan anggaran sesuai target baru yang telah disesuaikan Penyesuaian pejabat perbendaharaan yang baru diangkat agar dipercepat
Capaian Output	<ul style="list-style-type: none"> Penyerapan anggaran tidak maksimal Persepsi capaian dihitung atas realisasi anggaran saja Output tidak maksimal karena satker menunggu juknis dari kantor pusat 	<ul style="list-style-type: none"> Pengelola keuangan agar berkoordinasi dengan penanggung jawab kegiatan/tim teknis untuk mengetahui progres kegiatan yang dilaksanakan Melaporkan capaian output sebelum batas waktu Berkonsultasi dengan KPPN apabila ada kendala dalam penyampaian laporan capaian output

TANTANGAN EKSEKUSI BELANJA

1. Tantangan Penyesuaian Rencana Belanja

- Adanya ketidaksesuaian antara rencana belanja dengan realisasi. Hal ini diakibatkan pengelola keuangan belum memiliki kompetensi memadai dalam hal perencanaan serta berkoordinasi antara PPK, KPA dan seksi teknis pelaksana kegiatan belum terjalin dengan baik.
- Adanya blokir pagu yang dilakukan pada level Kementerian/Lembaga mengakibatkan banyak kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana telah direncanakan.
- Pelaksanaan Revisi penyesuaian rencana penarikan dana terhambat karena proses revisi oleh Eselon I sedang berjalan. Akibatnya satker tidak dapat melakukan revisi penyesuaian Halaman III DIPA karena proses sistem secara otomatis terkunci.
- Kurangnya pemahaman KPA terkait urgensi revisi halaman III DIPA. KPPN Solok selalu mengingatkan satker untuk melakukan revisi halaman III DIPA pada awal triwulan, namun beberapa satker tidak melakukan revisi dengan alasan KPA tidak merasa perlu untuk melakukan revisi.

Untuk mengatasi masalah tersebut KPPN Solok merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- Meningkatkan koordinasi internal antara bagian perencanaan dan pelaksanaan sehingga pelaksanaan anggaran sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- Meningkatkan koordinasi secara aktif dengan eselon I terkait informasi mengenai proses revisi yang dilakukan oleh eselon 1 dan jadwal pembukaan blokir pagu.
- KPA agar melakukan penyesuaian rencana penarikan dana dengan menyampaikan revisi halaman III DIPA pada awal triwulan.
- KPA agar melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran setiap bulan mengingat respon satker dalam menghadapi dan menindaklanjuti perubahan sangat penting untuk kelancaran belanja.

2. Tantangan Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan Jasa membutuhkan waktu dan persiapan yang cukup besar. Bagi Satker yang tidak melakukan kontrak pra DIPA, sudah proses lelang namun masih terkendala, atau sampai dengan awal semester 2 belum memulai proses lelang, agar segera dilakukan agar kegiatan dapat selesai sesuai target.

Pagu belanja modal pada wilayah kerja KPPN Solok adalah sebesar Rp7,35 miliar dan telah terealisasi sebesar Rp2,97 miliar atau mencapai 40,44%. Salah satu penyebabnya yaitu blokir pagu sebesar Rp750,76 juta atau 10,22% dari pagu belanja modal. Terkait hal tersebut, KPPN merekomendasikan kepada satker agar meningkatkan koordinasi secara aktif dengan eselon I terkait informasi mengenai proses revisi yang dilakukan oleh eselon 1 dan jadwal pembukaan blokir pagu.

Disamping itu, rendahnya minat satker dan *vendor* terhadap implementasi *Digipay* menjadi tantangan dalam pengadaan barang dan jasa. Sampai akhir Juni 2022, terdaftar sebanyak 19 satker dan 7 vendor telah bergabung dalam *platform digipay*. Sementara target yang ditetapkan adalah sebanyak 30% satker (20 satker). Sejauh ini baru 2 satker yang aktif melakukan transaksi, yaitu KPPN Solok dan KPP Pratama Solok. KPPN Solok akan melakukan asistensi implementasi *digipay* kepada satker sehingga diharapkan satker yang telah bergabung dapat melaksanakan transaksi secara aktif.



3. Tantangan Eksekusi Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa

Setiap Jenis aktivitas Satker mempunyai karakteristik dan tingkat kesulitan yang berbeda. Untuk itu, perlu memetakan administrasi dan kelengkapan yang dibutuhkan untuk pencairan belanja sesuai jenis aktivitas belanja.

Beberapa tantangan terkait eksekusi kegiatan pengadaan barang dan jasa yang terjadi pada satker lingkup KPPN Solok:

- Terbatasnya jumlah vendor pada *Digipay*.
- Beberapa satker belum aktif bertransaksi menggunakan *Cash Management System (CMS)*. Hal ini diakibatkan karena seringnya pergantian KPA sehingga harus berulang kali mengajukan registrasi CMS ke bank

Upaya KPPN Solok terkait eksekusi kegiatan pengadaan barang dan jasa, antara lain:

- Menyusun inovasi BASANDI dalam percepatan implementasi *digipay002* bekerja sama dengan BRI Cabang Solok. BRI Cabang Solok berkomitmen melakukan percepatan aktivasi dan update CMS *Virtual Account* dan Kartu Kredit Pemerintah dan melakukan pembinaan terhadap vendor.

WARNING SEMESTER II

MEWUJUDKAN AKHIR TAHUN YANG LEBIH BAIK

Berdasarkan data realisasi belanja pada Semester I Tahun 2022, diharapkan realisasi belanja satker dalam wilayah kerja KPPN Solok pada akhir Semester II Tahun 2022 mampu mencapai target penyerapan anggaran yang telah ditentukan sebagai berikut

No	Jenis Belanja	Target Realisasi	
		Triwulan 3	Triwulan 4
1	Belanja Pegawai	75%	95%
2	Belanja Barang	70%	90%
3	Belanja Modal	70%	90%

Selain itu, target pencapaian IKPA pada Triwulan III dan IV adalah sebesar minimal sebesar 93. Hal ini mengingat nilai IKPA KPPN Solok pada Triwulan I dan II hanya mencapai 89,96 dan 94,20.

Kemungkinan permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi pada periode Semester II adalah terjadinya penumpukan pengajuan tagihan pada akhir tahun anggaran. Hal ini disebabkan antara lain :

- Pelaksanaan kegiatan tidak memperhatikan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA
- Penumpukan realisasi anggaran di akhir tahun:
 - Kegiatan/pekerjaan yang sudah diselesaikan sampai dengan triwulan III yang baru diajukan tagihannya di triwulan IV
 - Pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa yang seharusnya dilaksanakan di triwulan I, II atau III baru dilaksanakan pada triwulan IV
- Permasalahan SDM:
 - seperti adanya pergantian pejabat perbendaharaan menjelang akhir tahun anggaran karena mutasi atau pensiun
 - pejabat perbendaharaan melaksanakan perjalanan dinas di akhir tahun anggaran sehingga proses pengajuan tagihan menjadi terkendala

Untuk mengatasi masalah tersebut KPPN Solok merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan III sehingga dapat meminimalisir terjadinya penumpukan pencairan dana pada akhir tahun
- Melakukan percepatan pelaksanaan pembayaran kegiatan paling lama dilakukan pada H-1 sebelum batas akhir waktu pengajuan pembayaran untuk memitigasi terjadinya permasalahan *maintenance* SAKTI
- Segera mengajukan revisi DIPA untuk pagu yang teridentifikasi berlebih/kurang

Untuk mewujudkan target yang telah ditetapkan, KPPN Solok akan melaksanakan beberapa upaya sebagai berikut:

- Melaksanakan evaluasi pelaksanaan anggaran setiap bulan



- Melakukan sosialisasi langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran 2022
- Melakukan pembinaan kepada satker agar tidak menumpuk realisasi anggaran di akhir tahun
- Melakukan monev dan pendampingan implementasi SAKTI